



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPPTSP)
KABUPATEN PINRANG**



TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Pinrang dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (RENJA DPMPTSP) Kabupaten Pinrang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 sesuai tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada program dan kegiatan Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang tahun 2023.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program / Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu RENJA berfungsi untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Rencana Kerja (Renja) 2023 menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif. Melalui Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara transparan, cepat dan mudah sebagai perwujudan e Governance secara umum serta memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi masyarakat dan pelaku usaha pada khususnya.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan penyusunan laporan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) tahun 2022 ini.

Pinrang,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP,


ANDI MIRANI, AP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19740603 199311 2 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang Tahun 2023, disusun dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah di bidang pelayanan publik, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pinrang, Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang.

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP yang merupakan dokumen perencanaan kinerja untuk tahun ke 4 (empat) periode RENSTRA DPMPTSP Tahun 2019 – 2024 dengan memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang. Renja DPMPTSP memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Pinrang dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang memuat tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target pencapaian Kerja, pengorganisasian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Pelayanan merupakan salah satu bentuk wujud dari upaya pemerintah untuk melayani masyarakatnya. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan penerapan pelayanan prima yang efektif, efisien dan berbasis elektronik sehingga pelayanan menjadi ujung tombak dalam mewujudkan pembangunan dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta dibarengi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus naik serta meningkatnya permintaan ruang membuat masyarakat di Kabupaten Pinrang sangat butuh pelayanan yang mudah, cepat dan transparan yang tidak membutuhkan banyak birokrasi yang berbelit-belit. Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan efektif sesuai dengan

standar prosedur yang berlaku. Menjawab kebutuhan masyarakat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang membentuk Kantor Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Pinrang (KP3KP) merupakan pusat kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan. Pusat Pelayanan Publik meliputi Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Usaha serta Pelayanan Perizinan Penanaman Modal,. Sehingga dengan terbentuknya KP3KP dapat memudahkan masyarakat umum dan para investor untuk memenuhi kebutuhannya.Kantor P3KP berada dalam satu atap dengan menerapkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum

Landasan idiil penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DPMPSTP Kabupaten Pinrang Tahun 2022 landasan konstitusional adalah UUD 1945. Sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - 6) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888);
 - 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan penanggaran pembangunan nasional;
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 17) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 18) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10);
 - 19) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klarifikasi dan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 25) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2009 – 2019 ;
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi

- Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
- 28) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13);
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 3);
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 12);
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14);
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Penyusunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 8);

- 34) Peraturan Bupati Pinrang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pinrang.
- 35) Peraturan Bupati Pinrang Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita daerah kabupaten Pinrang Nomor 27 tahun 2020);
- 36) Revisi Rencana Startegis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2019-2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja-SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2023 dimaksudkan untuk :

- Sebagai dasar/pijakan dan rujukan dalam menyusun RKA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Tahun 2023;
- Dokumen Renja-SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2023 harus bersinergis dengan RPJP Kabupaten Pinrang 2019-2029, RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019 - 2024, Perubahan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024
- Sebagai suatu dokumen perencanaan untuk referensi penilaian tahunan terhadap hasil capaian Kerja tahun sebelumnya.
- Menyiapkan kerangka evaluasi Kerja bagi Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang
- Renja DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2023 bertujuan untuk membangun konsistensi perencanaan dalam perwujudan capaian Kerja Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Menjelaskan secara ringkas latar belakang perlunya penyusunan Renja-SKPD, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan pencapaian Renstra Dinas PMPTSP tahun lalu, menganalisis kinerja perangkat Dinas PMPTSP, menjelaskan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PMPTSP serta mereview rancangan awal RKPD Dinas PMPTSP serta menelaah usulan program dan kegiatan masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

BAB III menelaah kebijakan nasional yang terkait Dinas PMPTSP memuat tujuan dan sasaran Renja yang akan dicapai serta program dan kegiatan prioritas Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang pada tahun 2023

BAB IV membuat uraian dan tabel rencana kerja serta pendanaan di Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang

BAB V Penutup yang menjelaskan tentang catatan penting dan kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2023

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP) TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas PMPTSP

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Renja n-1

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang terdiri dari 8 (Delapan) Kegiatan dan terdiri dari 26 Sub Kegiatan rata-rata capaiannya Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 9 (Sembilan) kegiatan rata-rata capaiannya 100 %
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang terdiri dari dari 1 (Satu) Kegiatan serta terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yang rata-rata capaiannya 100 %
3. Program Promosi Penanaman Modal yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan serta 2 (dua) Sub Kegiatan rata-rata capaiannya 100 %
4. Program Pelayanan Penanaman Modal yang terdiri dari 1(satu) Kegiatan serta terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan rata-rata capaiannya 100%
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan serta terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan rata-rata capaiannya 100%
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan serta 1 (satu) sub kegiatan rata-rata capaiannya 100%.

Sedangkan dalam evaluasi pelaksanaan pencapaian Renja tahun lalu diuraikan pada penjelasan dibawah ini tetapi dalam kajian (review) pencapaian renja tahun n-1 dan perbandinganya baru pada tahap penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran , uraiannya sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan capaiannya 0%.
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang terdiri dari :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan capaiannya 0%.

Sehingga dari evaluasi Renja tahun 2022 belum dapat diketahui perbandingannya. Renja Dinas PMPTSP tahun 2021 (n-2) dan tahun 2022 (n-1) dan Capaian RENSTRA dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang terdiri dari :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan rata-rata capaiannya 0 %
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan rata-rata capaiannya 0 %
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan capaiannya 0%
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan capaiannya 0%
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan capaiannya 0%
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan rata-rata capaiannya 0%
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan rata-rata capaiannya 0%
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan capaiannya 0 %
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang terdiri dari :
 - a. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan capaiannya 0 %
3. Program Promosi Penanaman Modal yang terdiri dari :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan capaiannya 0%
4. Program Pelayanan Penanaman Modal yang terdiri dari :
 - a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan capaiannya 0 %
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang terdiri dari :

Tabel 2.1

Evaluasi terhadap hasil Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada table 2.1 berikut :

SASARAN	URUSAN BIDANG /PEMERINTAH DAERAAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-		REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-		RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENJA TAHUN
				2020	2021	2020	2021	2023		2022
Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja			Nilai LKIP	71,5	73	73,5		74	Dinas PMPTSP	Kec. Wt Sawitto
			Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	71,5	73	73,5		74	Dinas PMPTSP	Kec. Wt Sawitto
		1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%		100%		
		a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen		
		01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 dan RENJA	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Dinas PMPTSP	Kec. Wt Sawitto
		02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas PMPTSP	Kec. Wt Sawitto
		03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas PMPTSP	Kec. Wt Sawitto
		04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas PMPTSP	Kec. Wt Sawitto
		05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas PMPTSP	Kec. Wt Sawitto
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKIP, LPPD, SPP dan Perjanjian Kinerja yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Dinas PMPTSP	Kec. Wt Sawitto	

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jasa Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	Dinas PMPTSP	Kec.Wt Sawitb
02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK, kegiatan makan minum, penggandaan/fotocopy, cetak yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	7 item	7 item	7 item	7 item	7 item	Dinas PMPTSP	Kec.Wt Sawitb
03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	18 jasa	18 jasa	18 jasa	18 jasa	18 jasa	Dinas PMPTSP	Kec.Wt Sawitb
05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Dinas PMPTSP	Kec.Wt Sawitb
07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	Dinas PMPTSP	Kec.Wt Sawitb
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan SKPD	100 %	100 %		100 %	100 %		
05. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu dan jumlah laporan pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu		2 orang		2 orang	2 orang	Dinas PMPTSP	Kec.Wt Sawitb

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang diipin mematuhi aturan Kepegawaian dan Persentase Aparatur Yang Meningkatkan Kecakapan dan Ketrampilannya		100 %		100 %	100 %		
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Batik pegawai dan pakaian olah raga		136 Pasang		136 Pasang	137 Pasang	Dinas PMPTSP	Kec.Wt.Sawitb
03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu		7 kegiatan		7 kegiatan	8 kegiatan	Dinas PMPTSP	Kec.Wt.Sawitb
11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan		3 laporan		3 laporan	4 laporan	Dinas PMPTSP	Kec.Wt.Sawitb
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi umum yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan		3 paket		3 paket	3 paket		
01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik (lampu pijar baterai kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		1 Paket		1 Paket	1 Paket	Dinas PMPTSP	Kec.Wt.Sawitb
02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		7 jenis barang		7 jenis barang	8 jenis barang	Dinas PMPTSP	Kec.Wt.Sawitb
09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbeyarkan tepat waktu		50 Kali		50 Kali	55 Kali	Dinas PMPTSP	Kec.Wt.Sawitb

		02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Lokasi Pengembangan Investasi /Penyusunan Prospektus Investasi	1 Paket		1 paket pekerjaan	1 paket pekerjaan	Dinas PMPTSP	Kec.Wt Sawitto
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	4,76%		4,76%	4,76%		
			Jumlah proyek PMDN dan PMA	PMDN : 2.133 PMA : 5		PMDN : 2.239 PMA : 6	PMDN : 2.352 PMA : 6	Dinas PMPTSP	Kec.Wt Sawitto
			Jumlah Tenaga Kerja	2.133		2.239	2.352	Dinas PMPTSP	Kec.Wt Sawitto
		a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	5 Kegiatan		5 Kegiatan	6 kegiatan		
		01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Buku dan Brosur Investasi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	Dinas PMPTSP	Kec.Wt Sawitto
		02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal Daerah (Pameran Investasi Pekan Raya Sul Sel,Sulsel Expo,Pinrang Expo,FIP)	4 Kali		4 Kali	4 Kali	Dinas PMPTSP	Kec.Wt Sawitto
Meningkatnya aspek legalitas perizinan		2.PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Investasi PMDN dan PMA		- Perizinan Usaha 2500 - Perizinan Non Usaha 1420		- Perizinan Usaha 2700 - Perizinan Non Usaha 1740	- Perizinan Usaha 2900 - Perizinan Non Usaha 1800	
		a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan perizinan penanaman modal yang akuntabel	100%		100%	100%		

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang disiplin mematuhi aturan Kepegawaian dan Persentase Aparatur Yang Meningkatkan Kecakapan dan Ketrampilannya		100 %		100 %	100 %		
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Batik pegawai dan pakaian olah raga		136 Pasang		136 Pasang	137 Pasang	Dinas PMPTSP	Kec.Wt Sawitto
03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu		7 kegiatan		7 kegiatan	8 kegiatan	Dinas PMPTSP	Kec.Wt Sawitto
11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan		3 laporan		3 laporan	4 laporan	Dinas PMPTSP	Kec.Wt Sawitto
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi umum yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan		3 paket		3 paket	3 paket		
01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik (lampu pijar bateray kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		1 Paket		1 Paket	1 Paket	Dinas PMPTSP	Kec.Wt Sawitto
02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		7 jenis barang		7 jenis barang	8 jenis barang	Dinas PMPTSP	Kec.Wt Sawitto
09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu		50 Kali		50 Kali	55 Kali	Dinas PMPTSP	Kec.Wt Sawitto

		02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa penyediaan perizinan, jasa sopir, jasa service, suku cadang dan BBM kendaraan dinas operasional yang terbayarkan tepat waktu		3 kendaraan dinas		3 kendaraan dinas	4 kendaraan dinas	Dinas PMPTSP	Kec. Wt Sawitb
		06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan		3 jenis barang		4 jenis barang	4 jenis barang	Dinas PMPTSP	Kec. Wt Sawitb
		11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan bangunan kantor		1 paket pekerjaan		3 paket pekerjaan	3 paket pekerjaan	Dinas PMPTSP	Kec. Wt Sawitb
Meningkatnya penanaman modal		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek PMDN dan PMA		Proyek PMDN 2.133 Proyek PMA 5		Proyek PMDN 2.239 Proyek PMA 6	Proyek PMDN 2.351 Proyek PMA 6	Dinas PMPTSP	Kec. Wt Sawitb
		a. Penetapan pemberian fasilitas/intensif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian fasilitas/intensif di bidang Penanaman Modal		100%		100%	100%		
		01 Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan penanaman modal		2 kebijakan		2 kebijakan	2 kebijakan	Dinas PMPTSP	Kec. Wt Sawitb
		02 Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan penanaman modal	Persentase laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan penanaman modal		2 laporan		2 laporan	2 laporan	Dinas PMPTSP	Kec. Wt Sawitb
		b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah potensi Investasi daerah				1 Kegiatan	2 Kegiatan	Dinas PMPTSP	Kec. Wt Sawitb
		01. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPM)		-			1 Dokumen	Dinas PMPTSP	Kec. Wt Sawitb

		01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan dan waktu proses penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan		2 Kegiatan		2 Kegiatan	3 Kegiatan	Dinas PMPTSP	Kec.Wt.Sawitto
		02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal		4 kegiatan		4 kegiatan	5 kegiatan	Dinas PMPTSP	Kec.Wt.Sawitto
		03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Permasalahan Perusahaan PMA dan PMDN yang ditindak lanjut serta Aplikasi pengaduan permasalahan pelaksanaan PM		4 laporan		4 laporan	5 laporan	Dinas PMPTSP	Kec.Wt.Sawitto
		04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan one day service, Film Pendek dan Jemput Bola serta cetak brosur layanan		5 kegiatan		5 kegiatan	5 kegiatan	Dinas PMPTSP	Kec.Wt.Sawitto
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal		3. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi PMDN dan PMA		- PMDN: 1.852.212.257,57 4 PMA: \$ 137.772.692		- PMDN: 1.944.822.870.453 - PMA: \$ 144.661.327	PMDN: 2.042.064.013.975 PMA: \$ 151.894.393	Dinas PMPTSP	Kec.Wt.Sawitto
		a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		10 kegiatan		10 kegiatan	10 kegiatan	Dinas PMPTSP	Kec.Wt.Sawitto
		01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pengawasan investasi penanaman modal		100%		100%	100%	Dinas PMPTSP	Kec.Wt.Sawitto

		02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan LKPM, SKM dan Kebijakan PM serta Pelayanan Perizinan dan Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah		3 kegiatan		3 kegiatan	4 kegiatan	Dinas PMPTSP	Kec.Wt.Sawitb
		03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan sosialisasi UMKM, LKPM Online, perizinan bangunan gedung dan FIP, perizinan usaha secara OSS, Bimtek RAJIN dan Satgas Percepatan Investasi		7 kegiatan		7 kegiatan	8 kegiatan	Dinas PMPTSP	Kec.Wt.Sawitb
Meningkatnya aspek legalitas perizinan		4. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Kepuasan masyarakat (SKM)		Indeks SKM (85)		Indeks SKM (85)	Indeks SKM (86)	Dinas PMPTSP	Kec.Wt.Sawitb
		a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%		100%	100%		
		01. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi berbasis IT dan pengelolaan data informasi		3 kegiatan		3 kegiatan	4 kegiatan	Dinas PMPTSP	Kec.Wt.Sawitb
	TOTAL RENCANA ANGGARAN									

Tabel 2.1

Evaluasi terhadap hasil Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada table 2.1 berikut

1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 4.171.082.807						Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 4.984.640.469
1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 32.240.000	Rp 35.380.000	Rp 26.190.000	Rp 37.367.000	81%	10,57%	Rp 48.930.000	81,98%	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Disusun	Rp 33.615.000	Rp 32.715.000	Rp 34.797.300				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Disusun	Rp 33.835.000
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000	Rp 1.638.000	100%	7,28%	Rp 3.375.000	104%	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 dan RENCANA	8.800.000	8.800.000	8.800.000				Jumlah Dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 dan RENCANA	Rp 8.800.000
1.3	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Rp 133.340.000	Rp 132.812.000	Rp 133.295.000	Rp 113.032.000	100%	8,61%	Rp 199.746.000	104%	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA Tahun	6.435.000	5.380.000	6.435.000				Jumlah Dokumen RKA Tahun	Rp 6.500.000
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 18.199.000	Rp 18.199.000	18.199.000	Rp 18.199.000	100%	10,00%	Rp 27.298.500	105%	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	6.195.000	6.200.000	6.195.000				Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Rp 6.200.000
1.5	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4.500.000	Rp 5.000.000	-	Rp 2.000.000.000	-	40,00%	Rp 7.000.000	40%	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	2.060.000	2.200.000	2.060.000				Jumlah Dokumen DPA	Rp 2.200.000
1.6	Penyediaan Perlengkapan dan Perakatan Kantor	Rp 15.150.000	Rp 16.500.000	15.130.000	Rp 9.800.000	100%	5,94%	Rp 23.400.000	103%	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	2.835.000	2.835.000	2.835.000				Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Rp 2.835.000
1.7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rp 190.000.000	Rp 217.520.000	Rp 189.994.000	Rp 113.000.000	100%	5,19%	Rp 298.760.000	103%	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKIP, LPPD, SPP dan Pejarjian Kinerja yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	7.300.000	7.300.000	8.472.300				Jumlah Dokumen LKIP, LPPD, SPP dan Pejarjian Kinerja yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Rp 7.300.000
1.8	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 362.791.000	Rp 362.596.000	350.012.000	Rp 231.465.000	100%	5,90%	Rp 559.084.000	103%	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan	Rp 3.214.828.307	Rp 3.338.851.307	Rp 3.288.118.984				Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan	Rp 3.684.905.469
1.9	Peningkatan Pengalokasian Barang dan Aset	Rp 17.700.000	Rp 20.100.000	17.700.000	Rp 20.100.000	100%	10,00%	Rp 27.750.000	105%	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jasa Gaji dan Tunjangan ASN	2.735.966.807	2.855.237.807	2.973.430.284				Jumlah Jasa Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.214.365.977

Renja Tahun 2023- DPMTSP
Kabupaten Pinrang

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%					2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK, kegiatan makan minum, pengandaian/fotocopy, cetak yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	336.948.500	337.568.500	314.585.500				Jumlah ATK, kegiatan makan minum, pengandaian/fotocopy, cetak yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Rp	338.343.402
2.1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 92.500.000	Rp 27.300.000	92.340.000	Rp 15.000.000	100%	84,86%	Rp 106.150.000	127%	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	133.880.000	130.000.000	122.863.200				Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Rp	134.000.000
1.10	Pengadaan Perakitan Gedung Kantor	Rp 141.500.000	Rp 40.000.000	141.467.000	Rp 43.200.000	100%	100,00%	Rp 161.500.000	154%	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	6.545.000	6.545.000	6.185.000				Jumlah laporan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	Rp	6.686.000
1.11	Pengadaan Meubelair	Rp 45.200.000	Rp 75.250.000	Rp 45.050.000	-	100%	-	Rp 82.825.000	100%	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	1.480.000	1.500.000	1.055.000				Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	Rp	1.500.000
2.4	Peneliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 30.000.000	Rp 60.000.000	Rp 29.860.000	-	100%	-	Rp 60.000.000	100%	c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan SKPD	Rp 11.700.000	Rp 11.700.000	Rp 11.700.000				Persentase penyusunan laporan SKPD	Rp	11.700.000
2.5	Peneliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp 39.700.000	Rp 30.200.000	Rp 36.413.000	22.663.000	100%	75,94%	Rp 54.800.000	138%	1.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu dan jumlah laporan pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	11.700.000	11.700.000	11.700.000				Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu dan jumlah laporan pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Rp	11.700.000
2.6	Peneliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 2.200.000	Rp 4.000.000	Rp 2.400.000	Rp 4.000.000	100%	100%	Rp 4.200.000	150%	d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang disiplin mematuhi aturan Kepegawaian dan Persentase Aparatur Yang Meningkatkan Kecakapan dan Ketamplannya	Rp 80.966.000	Rp 138.700.000	Rp 81.836.000				Persentase Aparatur yang disiplin mematuhi aturan Kepegawaian dan Persentase Aparatur Yang Meningkatkan Kecakapan dan Ketamplannya	Rp	131.600.000
2.7	Peneliharaan Rutin/ Berkala Perakitan Gedung Kantor	Rp 4.800.000	Rp 10.000.000	Rp 4.680.000	Rp 2.985.000	100%	30%	Rp 9.800.000	115%	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Batik pegawai dan pakaian olah raga	35.700.000	35.700.000	35.700.000				Jumlah Pakaian Batik pegawai dan pakaian olah raga	Rp	35.000.000
2.8	Rahibatis Sedarang/Berat Gedung Kantor	Rp 70.000.500	Rp 170.000.000	Rp 69.900.000	-	100%	-	Rp 135.000.500	100%	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu	3.975.000	4.000.000	3.975.000				Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu	Rp	3.900.000

3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	71,01	71,05	71,64	-	100%			3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan	41.250.000	100.000.000	42.560.000				Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan	Rp	92.000.000
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3.360.000	Rp 6.000.000	3.360.000	3.360,00	100%	6,60%	Rp 6.360.000	103%	e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi umum yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan	Rp 112.432.000	Rp 136.000.000	Rp 168.827.868			Jumlah Sub Kegiatan Administrasi umum yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan	Rp	136.000.000
3.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Rp 1.855.000	Rp 5.000.000	1.855.000	2.035,00	100%	4,07%	Rp 4.355.000	102%	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik (lampu pijar baterai kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	7.610.000	8.000.000	36.610.000			Jumlah alat listrik dan elektronik (lampu pijar baterai kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Rp	7.000.000
3.3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 5.608.000	Rp 7.500.000	Rp 5.608.000	5.101,00	100%	6,80%	Rp 9.358.000	103%	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	7.632.000	8.000.000	7.580.000			Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Rp	8.000.000
3.4	Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Rp 41.926.000	Rp 27.000.000	Rp 36.899.000	7.292,00	100%	2,70%	Rp 55.426.000	101%	3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	97.190.000	126.000.000	114.727.868			Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	Rp	120.000.000
4	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%		100%	100%	2.000,00	100%	100%		1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai analisa kebutuhan	Rp 244.130.000	Rp 600.000.000	Rp 549.257.100			Jumlah pengadaan barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai analisa kebutuhan	Rp	600.000.000
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	48.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	100%	100	Rp 66.000.000	5100%	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Kursi Kerja sesuai analisa kebutuhan	4.400.000	10.000.000	65.000.000			Jumlah Kursi Kerja sesuai analisa kebutuhan	Rp	10.000.000
4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	220.000.000	100.000.000	Rp 191.753.000	40.183.000	100%	40	Rp 270.000.000	2108%	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	91.250.000	90.000.000	128.746.000			Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Rp	90.000.000

Renja Tahun 2023- DPMPSTP
Kabupaten Pinrang

5.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	84,4	84,4						7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang dibangun sesuai analisa kebutuhan	140.480.000	500.000.000	355.511.100			Jumlah bangunan kantor yang dibangun sesuai analisa kebutuhan	Rp 400.000.000
5.1	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	37.000.000	15.000.000	37.000.000	15000000	100%	Rp 44.500.000	50%	g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pelayanan umum kantor	Rp 311.636.000	Rp 316.000.000	Rp 294.489.544			Persentase jasa pelayanan umum kantor	Rp 316.500.000
5.2	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	102.150.000	14.165.000	101.990.000	13.280.000,00	100%	Rp 109.242.500	147%	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon,Internet,SMS dan listrik	34.470.000	35.000.000	15.304.544			Jumlah rekening telepon,Internet,SMS dan listrik	Rp 35.500.000
5.3	Penyelenggaraan pameran investasi	77.316.000	27.500.000	66.964.000	27.482.000,00	100%	Rp 91.066.000	150%	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanan umum kantor yang terbayarkan tepat waktu	279.165.000	280.000.000	279.165.000			Jumlah jasa Pelayanan umum kantor yang terbayarkan tepat waktu	Rp 280.000.000
5.4	Penyusunan Buku Rencana Umum Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai analisa kebutuhan	Rp 159.785.500	Rp 160.000.000	Rp 126.221.216			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai analisa kebutuhan	Rp 162.200.000
5.5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	18.310.000	4.924.000	12.935.000	4.924.000	71%	Rp 20.772.000	72%	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa penyediaan perizinan,jasa sopir,jasa service,suku cadang dan BBM kendaraan dinas operasional yang terbayarkan tepat waktu	86.607.500	85.000.000	41.673.216			Jumlah jasa penyediaan perizinan,jasa sopir,jasa service,suku cadang dan BBM kendaraan dinas operasional yang terbayarkan tepat waktu	Rp 86.000.000
6.	Program Peningkatan Ilmu Investasi dan Realisasi investasi	Nilai Realisasi PMDN Rp.1.020.269.289,317 dan Nilai Realisasi PMA \$ 39.411.395,18	Nilai Realisasi PMDN Rp.1.080.269.423,000 dan Nilai Realisasi PMA \$ 45.632.000	Nilai Realisasi PMDN Rp.1.764.011.673,800 dan Nilai Realisasi PMA \$ 45.632.000		170%		163%	2	Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya	Jumlah perakitan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	10.170.000	15.000.000	23.650.000			Jumlah perakitan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	Rp 15.000.000
						224%			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan bangunan kantor	60.928.000	60.000.000	60.700.000			Jumlah Pemeliharaan bangunan kantor	Rp 61.200.000

Renja Tahun 2023- DPMP TSP
Kabupaten Pinrang

6.1	Menfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di bidang Investasi	Rp 157.000.000	-	Rp 144.164.000	-	-	100%	Rp 222.664.000	50%	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Investasi iklim penanaman modal	Rp 80.000.000	Rp -					Meningkatnya Investasi iklim penanaman modal	Rp 76.800.000
											Jumlah Proyek PMDN dan Proyek PMA	Proyek PMDN 2.133 Proyek PMA 5	Proyek PMDN 2.229 Proyek PMA 6					Jumlah Proyek PMDN dan Proyek PMA	Proyek PMDN 2.361 Proyek PMA 6
										a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi lewangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal	Rp -	Rp -					Persentase pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal	
										01 Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan	Jumlah kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman		-					Jumlah kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman	
										02 Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Persentase laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman		-					Persentase laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman	
6.2	Pengembangan sistem informasi dan penanaman modal	Rp 161.000.000	Rp 110.719.000	Rp 160.625.000	Rp 100.719.000	100%	90,9%	Rp 216.369.500	146%	b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi unggulan daerah	Rp 60.000.000	Rp 75.000.000	Rp 90.000.000				Tersedianya peta potensi unggulan daerah	Rp 76.800.000
6.3	Penyusunan Sistem Informasi dan Penanaman Modal di daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPM)	-	-					Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPM)	
6.4	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Rp 91.950.000	Rp 33.904.000	Rp 86.202.000	Rp 33.902.000	100%	2,6%	Rp 108.902.000	101%	2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Lokasi Pengembangan Investasi /Penyusunan Prospektus Investasi	Rp 50.000.000	Rp 75.000.000	50.000.000				Jumlah Pemetaan Lokasi Pengembangan Investasi /Penyusunan Prospektus Investasi	Rp 76.500.000
6.5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp 15.825.000	Rp 8.800.000	Rp 15.650.000	Rp 8.800.000	99%	100%	Rp 20.225.000	149%	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Penanaman Modal	Rp 305.299.000	Rp 315.000.000					Meningkatnya Penanaman Modal	Rp 435.000.000
											Jumlah proyek PMDN dan PMA	PMDN : 2.133 PMA : 5	PMDN : 2.229 PMA : 6					Jumlah proyek PMDN dan PMA	PMDN : 2.362 PMA : 6
											Jumlah Tenaga Kerja	2.133	2.229					Jumlah Tenaga Kerja	2.362

Renja Tahun 2023- DPMPISP
Kabupaten Pinrang

7.	Program Informasi dan Penyuluhan Perizinan Bagi Masyarakat	90%	90%	100%					a. Penetapan pemberian fasilitas/intensif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian fasilitas/intensif di bidang Penanaman Modal	Rp 505.298.000	Rp 515.000.000	Rp 197.271.000				Persentase pemberian fasilitas/intensif di bidang Penanaman Modal	Rp 435.000.000	
7.1	Sosialisasi Perizinan dan Layanan Masyarakat	-	Rp 21.520.000	Rp 21.520.000	100%	1,72%	Rp 10.760.000	101%	1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Buku dan Brosur Investasi	Rp 19.915.000	15.000.000	16.700.000				Jumlah Buku dan Brosur Investasi	Rp 15.000.000	
8.	Program Peningkatan Kualitas Kelenbagaan Perizinan								2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal Daerah (Pameran Investasi Pekan Raya Sul Sel, Subkel Expo, Pinrang Expo, FIP)	Rp 48.084.000	500.000.000	193.571.000				Jumlah Promosi Penanaman Modal Daerah (Pameran Investasi Pekan Raya Sul Sel, Subkel Expo, Pinrang Expo, FIP)	Rp 420.000.000	
8.1	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Rp 86.450.000	Rp 37.806.000	Rp 82.650.000	Rp 37.795.000	100%	2,29%	Rp 105.163.000	101%	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Rp 164.567.000	Rp 225.000.000					Rp 186.000.000	
										Jumlah Investasi PMDN dan PMA	- Perizinan Usaha 2500 - Perizinan Usaha 1420	- Perizinan Usaha 2700 - Perizinan Non Usaha 1800					Jumlah Investasi PMDN dan PMA	- Perizinan Usaha 2900 - Perizinan Non Usaha 1800	
8.2	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	Rp 22.430.000	Rp 10.980.000	Rp 22.075.000	Rp 10.980.000	100%	4,48%	Rp 5.490.000	101%	a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal yang akurat/tepat	Rp 164.567.000	Rp 225.000.000	Rp 176.084.100				Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal yang akurat/tepat	Rp 186.000.000
8.3	Sistem Manajemen Pelayanan Publik	Rp 411.250.000	Rp 277.990.000	Rp 407.530.000	Rp 277.950	100%	6,98%	Rp 550.230.000	101%	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Updating dan Pemeliharaan Aplikasi	Rp 6.480.000	30.000.000	70.920.000				Jumlah Updating dan Pemeliharaan Aplikasi	Rp 30.000.000

Renja Tahun 2023- DPMTSP

Kabupaten Pinrang

2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal	Rp 47.961.000	30.000.000	49.561.000				Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal	Rp 30.000.000
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan layanan perizinan usaha dan usaha PM secara berkala	Rp 13.230.000	15.000.000	13.229.100				Jumlah laporan layanan perizinan usaha dan usaha PM secara berkala	Rp 15.000.000
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan one day service, Film Pendek dan Jemput Bola serta cetak brosur layanan	Rp 42.966.000	150.000.000	42.991.000				Jumlah kegiatan one day service, Film Pendek dan Jemput Bola serta cetak brosur layanan	Rp 111.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Nilai Realisasi Penanaman Modal PMDN-Rp dan PMA-US\$	Rp 352.033.000	Rp 80.000.000				Nilai Realisasi Penanaman Modal PMDN-Rp dan PMA-US\$	Rp 80.000.000
			Nilai Realisasi Penanaman Modal PMDN-Rp dan PMA-US\$	- PMDN: 1.852.212.257.574 PMA: \$ 137.772.692	- PMDN: 1.944.822.870.463 PMA: \$ 144.661.327				Nilai Realisasi Penanaman Modal PMDN-Rp dan PMA-US\$	PMDN: 2.042.064.013.975 PMA: \$ 151.894.393
a.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pengawasan investasi penanaman modal	Rp 352.033.000	Rp 80.000.000	Rp 359.062.000				Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pengawasan investasi penanaman modal	Rp 80.000.000
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pengawasan investasi penanaman modal	100.004.000	30.000.000	24.289.000				Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pengawasan investasi penanaman modal	Rp 30.000.000
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan LKPM, SKM dan Kebijakan PM serta Pelayanan Perizinan dan Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah	29.460.000	30.000.000	273.233.000				Jumlah laporan LKPM, SKM dan Kebijakan PM serta Pelayanan Perizinan dan Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah	Rp 30.000.000
03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan sosialisasi UMKM, LKPM Online, perizinan bangunan gedung dan FIP, perizinan usaha secara OSS, Bimtek RAJIN dan Satgas Percepatan Investasi	222.569.000	20.000.000	61.540.000				Jumlah kegiatan sosialisasi UMKM, LKPM Online, perizinan bangunan gedung dan FIP, perizinan usaha secara OSS, Bimtek RAJIN dan Satgas Percepatan Investasi	Rp 20.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			Rp 15.568.000	Rp 100.000.000						Rp 76.000.000
			Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85	85				Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86
a.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.568.000	Rp 100.000.000	Rp 15.675.000				Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 76.000.000
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi berbasis IT dan pengelolaan data informasi	15.568.000	Rp 100.000.000	15.675.000				Jumlah aplikasi berbasis IT dan pengelolaan data informasi	Rp 76.000.000
JUMLAH TOTAL			Rp 5.258.539.807	Rp 5.720.966.307						Rp 5.838.140.469

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan menjadi bagian dari upaya Pemerintah dalam peningkatan daya saing nasional melalui implementasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta kebijakan nasional lainnya yang mendukung peningkatan realisasi investasi secara Nasional.

DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan mendorong upaya kerjasama pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, pelaku usaha lokal dengan pengusaha regional, nasional, dan internasional serta upaya meningkatkan daya saing daerah melalui perbaikan iklim investasi dan pengembangan inovasi daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, DPMPTSP Kabupaten Pinrang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kebijakan daerah dan pelayanan di bidang penanaman modal serta perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Pinrang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, dan penyelenggaraan PTSP;
2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, dan penyelenggaraan PTSP;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, dan penyelenggaraan PTSP;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pencapaian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang 2021-2023

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Targrt Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analis
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
	Nilai LKIP	72	2021	73,5	74	73,	70	73,5	74	-
	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	72	73	73,5	74	-	70	73,5	74	-
	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84	85	85	86	89,87	87	85	86	-
	Jumlah Investasi PMDN dan PMA	- Perizinan Usaha 2000 - Perizinan Non Usaha 1239		- Perizinan Usaha 2700 - Perizinan Non Usaha 1740	- Perizinan Usaha 2900 - Perizinan Non Usaha 1800	- Perizinan Usaha 2249 - Perizinan Non Usaha 1266	- Perizinan Usaha 2350 - Perizinan Non Usaha 1345	- Perizinan Usaha 2700 - Perizinan Non Usaha 1740	- Perizinan Usaha 2900 - Perizinan Non Usaha 1800	-
	Nilai Realisasi Penanaman Modal PMDN-Rp dan PMA-US\$	-PMDN : 1.080.259.423.000 -PMA : \$ 45.632.000	- Perizinan Usaha 2500 - Perizinan Non Usaha 1420	-PMDN: 1.325.006.000.000 -PMA: \$ 58.922.300	-PMDN: 2.042.064.013.975 -PMA: \$ 151.894.393	PMDN:1.764.011.673.880 -PMA: \$ 131.212.088	PMDN:1.764.011.869.880 -PMA: \$ 154.212.088	-PMDN: 1.325.006.000.000 -PMA: \$ 58.922.300	-PMDN: 2.042.064.013.975 -PMA: \$ 151.894.393	-
	Jumlah Proyek PMDN dan Proyek PMA	1100 3	-PMDN: 1.105.632.540.000 -PMA: \$ 54.230.040	1920 3	2.351 6	2031 4	2500 4	1920 3	2351 6	-
	Jumlah Tenaga Kerja	2.159	1504 3	2.379	2.351	-	-	2.379	2.351	-

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi perangkat daerah

Berdasarkan isu strategis daerah Kabupaten Pinrang terkait Investasi dan pelayanan public adalah Implementasi e –Government dalam rangka peningkatan layanan public dan pemenuhan pelayanan dasar hal ini terkait pada penjabaran Misi pertama dan keempat RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 dan keterkaitannya dengan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pinrang tahun 2019-2024 yaitu Misi Pertama **“Memantapkan system birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.** Misi ini mencakup upaya pokok mewujudkan system birokrasi yang akuntabel dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Upaya perwujudan sistem birokrasi yang akuntabel serta pelayanan publik yang prima tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau electronic governance (e-governance) dan Misi Kedua **“Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.** Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengembangan investasi yang atraktif, penanganan penyandang masalah kesejahteraan social, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan pertanian, pembangunan peternakan, pembangunan perikanan, dan optimalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat. pencapaiannya melalui indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang yaitu mendorong harmonisasi dan koordinasi kebijakan pelayanan penanaman modal. merumuskan kebijakan penyederhanaan dan efisiensi pelayanan penanaman modal, sehingga pendekatan ini menjadi langkah-langkah harmonisasi kebijakan pelayanan dengan penerapan **“Paket Kebijakan Investasi”** (PAKSI) sebagai upaya pemberian kemudahan bagi para investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang dan aplikasi **“SIAP BOSS”** (Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan berbasis OSS) serta aplikasi **“RAJIN”** (Gerai Perizinan di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa) dan

Peningkatan Nilai Investasi dengan memberikan kemudahan,fasilitasi dan kerjasama dibidang investasi melalui **FIP (Forum Investasi Pinrang)** serta berfungsinya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Pinrang adalah salah satu jawaban dan manivestasi atas reformasi birokrasi dalam hal pelayanan publik.Kehadiran MPP ini adalah jawaban atas kritik Presiden yang menyebutkan bahwa Birokrasi dalam hal pelayanan publik cenderung kaku dan terjebak dalam hal yang berbau prosedural dan administrative. Dengan kehadiran MPP diharapkan dapat menghilangkan kekakuan koordinasi dan ego sektoral antar organisasi perangkat daerah (OPD) serta bisa membangun kerjasama membangun budaya melayani.

Pengurusan dan pendaftaran izin sudah dapat diakses melalui jaringan internet dengan menggunakan aplikasi **SIAP BOSS, KONGSI** adalah Kolaborasi Pembangunan Berbasis Investasi yang merupakan suatu instrumen yang memudahkan praktik kerjasama antar masyarakat dengan pelaku usaha (investor) dalam melaksanakan dan mengembangkan investasi serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan SDM kapital dan teknikal dalam pengembangan usaha sedangkan tujuannya adalah mengkolaborasikan potensi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. **JABAT ERAT** merupakan kerjasama antara Investor PMDN dan PMA dengan Usaha Kecil Menengah Mikro (UMKM).

Terkait Misi pertama dan kedua tersebut diatas permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Adanya kebijakan pemerintah pusat berupa pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik atau yang biasa dekenal dengan Online Single Submission (**OSS**), yang belum berjalan secara maksimal karena adanya gangguan teknis (jaringan yang tidak stabil),belum sinkronnya NSPK diantara kementerian / lembaga / pemerintah daerah, kurangnya pendampingan/bimbingan dari kementerian/lembaga teknis kepada pemerintah kabupaten/kota, serta masih adanya proses penyempurnaan pada aplikasi OSS sendiri, yang menyebabkan pelayanan perizinan berusaha di daerah sangat terpengaruh. Penerapan sistem OSS (Online Single Submission)

oleh pemerintah pusat yang belum berjalan secara maksimal karena adanya gangguan teknis (jaringan) yang belum stabil serta sarana prasarana penunjang system tersebut masih kurang memadai sehingga sangat menghambat dalam proses penerbitan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan, Penyesuaian aplikasi yang baru dalam proses penerbitan perizinan masih terus dilakukan dengan mengkondisikan sarana dan prasana yang tersedia dan sumber daya manusia yang ada. Terbatasnya data dan Informasi potensi unggulan untuk pendukung kegiatan FIP, masih kurangnya minat investor menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang, Kurangnya promosi terkait potensi unggulan pertanian, perikanan dan pariwisata di Kabupaten Pinrang.

Dampak yang terjadi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah peningkatan layanan perizinan yaitu dengan tersedianya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pinrang dilakukan disatu tempat,mudah,cepat dan terintegrasi sedangkan MPP ini dibentuk untuk mendorong fundamental aparatur sipil negara (ASN) memberikan layanan prima kepada masyarakat dan memberi kemudahan serta kepuasan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen maupun perizinan lainnya.Dan tersedianya Buku Prospektus yang merupakan dokumen berisi tentang Data Investasi dan peluang investasi di Kabupaten Pinrang yang bertujuan memberikan kemudahan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang serta tersedianya Aplikasi KONGSI yang merupakan aplikasi yang bertujuan mempertemukan antara pemilik lahan dengan calon investor

Melakukan sinkronisasi aplikasi OSS dengan Aplikasi SILEMPUE, yang didukung oleh Aplikasi **Tracking System** yaitu aplikasi yang terintegrasi mulai dari front office, back office hingga terbitnya izin melalui sistem jaringan, aplikasi **SMS Gateway** adalah layanan aplikasi yang secara langsung menyampaikan SMS ke Handphone yang berbasis android kepada pemohon bahwa posisi izinnya sudah diproses, **Aplikasi Digital Files** adalah aplikasi yang memudahkan dalam proses pengarsipan izin.

Keberadaan DPMPSTP merupakan suatu kemajuan besar kebijakan daerah di bidang penanaman modal, dimana tidak ada lagi resistensi antara SKPD teknis

dan lebih efektif menjalankan kebijakan di bidang penanaman modal serta adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati ke Kepala Dinas PMPTSP terkait penerbitan izin. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal daerah yang mengatur kedudukan, fungsi, dan kewenangan di bidang penanaman modal serta pemberian insentif dan kemudahan daerah. Adapun capaian realisasi PMD dan PMA pada tahun 2019-2020 nilai rata-ratanya 287% dan Penanaman Modal Asing capaiannya pada tahun 2019-2020 nilai rata-ratanya 163 %, dan meningkatnya investor/proyek PMDN pada tahun 2019-2020 nilai rata-rata capaiannya adalah 185% dan PMA capaiannya pada tahun 2018-2019 nilai rata-ratanya 133%,serta meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas usahanya dengan membuat dan mengurus sendiri izinnnya tanpa melalui CALO.

Tantangan yang akan dihadapi kedepan adalah makin meningkatnya persaingan global dan makin heterogennya masyarakat Pinrang dalam perkembangan yang terjadi saat ini sehingga Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang harus mampu menjawab tantangan perkembangan ini dengan peningkatan layanan dan peningkatan realisasi investasi dengan memberikan kemudahan,fasilitasi dan kerjasama dibidang investasi melalui program dan kegiatan serta inovasi yang berpihak kepada masyarakat usaha dan investor PMDN dan PMA. Adapun kegiatan dan inovasi yang dilakukan adalah Inovasi "**SIAP BOSS**" adalah Sistem Informasi dan aplikasi Perizinan berbasisi OSS, **Forum Investasi Pinrang (FIP)** merupakan forum di tingkat pusat dalam rangka menarik minat investor.Inovasi "**RAJIN**" (**Gerai Perizinan**) adalah peningkatan layanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan,Kelurahan dan Desa serta peningkatan pemenuhan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang layanan perizinan berbasis online terkait dengan pelaksanaan e- integrasi system pelayanan perizinan Penanaman Modal,

Pelayanan perizinan usaha,perizinan non usaha dan perizinan penanaman modal secara terpadu yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu bentuk dan wujud nyata

dari upaya pemerintah daerah untuk melayani masyarakatnya, sehingga pelayanan perizinan menjadi ujung tombak dalam menggerakkan perekonomian masyarakat serta memudahkan investor dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Pinrang. Sehingga terwujud komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah dan transparan. Strategis dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah pengembangan /UpGarding Aplikasi SIAP BOSS, dibentuknya Satgas Percepatan realisasi LKPM yang melibatkan semua bidang di Dinas PMPTSP dan lintas SKPD, lanjutan pelaksanaan forum Investasi bersama atau komunikasi lintas stakeholders dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten, Penyederhanaan regulasi investasi penanaman modal, peningkatan kompetensi melalui Diklat/pelatihan yang mengacu pada aktivitas unit layanan per bidang, kegiatan monitoring dan evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang program dan kegiatan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD yang direncanakan merupakan rancangan yang sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang dan telah dikondisikan dengan laporan evaluasi dan monitoring tahun sebelumnya atau n-1 yaitu terdiri dari 6 (enam) Program dengan 13 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.258.539.807 (Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah) Uraian tersebut dapat dilihat pada table T-C.31 dibawah ini.

Tabel T_C. 31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Pinrang

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.062.200.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.235.966.807	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				1.885.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				945.858.000	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				300.000.000	ii				184.800.000	
	a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah fasilitas dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	3 Investor	250.000.000	a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah fasilitas dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	3 Investor	184.800.000	
	1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				250.000.000	1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				184.800.000	
	b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Tersedianya peta potensi unggulan daerah	1 peta	50.000.000	b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Tersedianya peta potensi unggulan daerah	1 peta	-	
	1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				50.000.000	1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				-	
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				80.000.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				144.478.000	
	a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Terselenggaranya Pameran Investasi	4 Pameran	80.000.000	a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Terselenggaranya Pameran Investasi	4 Pameran	144.478.000	
	1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal				20.000.000	1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal				17.000.000	
	2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000	2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				127.478.000	

3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				620.000.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					521.000.000
	a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah Informasi layanan perizinan	3 Informasi Layanan	620.000.000	a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah informasi layanan perizinan	3 Informasi Layanan		521.000.000
	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan/Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				30.000.000	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan/Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					140.000.000
	2. Pemantauan Pemanuan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal				Rp 30.000.000	2. Pemantauan Pemanuan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal					102.000.000
	3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengkajian/Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan				15.000.000	3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengkajian/Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan					12.000.000
	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/insentif Daerah				111.000.000	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/insentif Daerah					267.000.000
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				135.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					86.560.000
	a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah Laporan SKM dan LKPM	2 Laporan	135.000.000	a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah Laporan SKM dan LKPM	2 Laporan		86.560.000
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				Rp 30.000.000	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal					37.960.000
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				Rp 30.000.000	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal					40.100.000
	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				Rp 20.000.000	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal					8.500.000

5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				750.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				9.020.000	
	a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah aplikasi berbasis IT Jumlah kegiatan pengelolaan data dan informasi	2 Aplikasi 4 Kegiatan	76.000.000	a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah aplikasi berbasis IT Jumlah kegiatan pengelolaan data dan informasi	2 Aplikasi 4 Kegiatan	9.020.000	
	1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				76.000.000	1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				9.020.000	
	SEMUA BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.177.290.900	SEMUA BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.290.108.807	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				4.177.290.900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				4.290.108.807	
	a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Disusun Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang Disusun	8 Dokumen 5 Dokumen	33.615.000	a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Disusun Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang Disusun	8 Dokumen 5 Dokumen	42.960.000	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perubahan Rencana 2019-2024 dan RENJA	1 Dokumen	Rp. 8.800.000	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perubahan Rencana 2019-2024 dan RENJA	1 Dokumen	4.420.000	
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Tahun	1 Dokumen	Rp. 6.500.000	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Tahun	1 Dokumen	4.170.000	
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	Rp. 6.200.000	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	4.380.000	
	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	Rp. 2.200.000	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	4.420.000	
	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 Dokumen	Rp. 2.820.000	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 Dokumen	4.800.000	
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen LKIP, LPPD, SPP dan Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	4 Dokumen	Rp. 7.300.000	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen LKIP, LPPD, SPP dan Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	4 Dokumen	8.141.000	

Renja Tahun 2023- DPMP TSP
Kabupaten Pinrang

b. Administrasi Keuangan					b. Administrasi Keuangan				
Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	1.694.905.469	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	1.165.503.558		
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jasa Gaji dan Tunjangan ASN	6 Dokumen	Rp. 3.214.365.977	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jasa Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.642.239.558		
2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK, kegiatan makan minum, pengandaian fotocopy, cetak yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	4 Laporan	Rp. 338.343.482	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK, kegiatan makan minum, pengandaian fotocopy, cetak yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	6 Dokumen	392.754.000		
3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	1 Laporan	Rp. 134.000.000	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	4 Laporan	118.280.000		
4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan	Rp. 6.696.000	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan	7.050.000		
5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan	Rp. 1.500.000	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan	5.180.000		
g. Penyediaan Jasa Peminjangan Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Watang Sawitto	Presentase jasa pelayanan umum kantor		g. Penyediaan Jasa Peminjangan Urusan Pemerintahan Daerah			365.410.000		
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, Internet, SMS dan Listrik		35.500.000	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			55.246.000		
2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanan umum kantor yang terbayarkan tepat waktu		4.500.000	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			300.165.000		

	h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai analisa kebutuhan		2.500.000	h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Watang Sawitto			15.800.000
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah jasa penyediaan perbahaan jasa sopir jasa service, suku cadang dan BBM kendaraan dinas operasional yang dibayarkan tepat waktu		135.000.000	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.250.000
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan		16.500.000	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				136.000.000
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan bangunan kantor		150.000.000	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.199.000
	f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah pengadaan barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai analisa	Kecamatan Watang Sawitto		f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah pengadaan barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kecamatan Watang Sawitto	292.925.000
	5 Pengadaan Mebel		Jumlah Kursi Kerja sesuai analisa kebutuhan	Rp	10.000.000	5 Pengadaan Mebel		Jumlah Kursi Kerja sesuai analisa kebutuhan		102.700.000
	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Rp	90.000.000	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan		168.125.000
	7 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah bangunan kantor yang dibangun sesuai analisa kebutuhan	Rp	400.000.000	7 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah bangunan kantor yang dibangun sesuai analisa kebutuhan		32.100.000

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Watang Sawitto	Persentase jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Watang Sawitto	Rp	315.500.000	g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Watang Sawitto	Persentase jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Watang Sawitto	366.410.000
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon, internet, SMS dan listrik		Rp	35.500.000	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon, internet, SMS dan listrik		55.245.000
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa Pelayanan umum kantor yang terbayarkan tepat waktu		Rp	280.000.000	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa Pelayanan umum kantor yang terbayarkan tepat waktu		300.165.000
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai analisis kebutuhan		Rp	182.200.000	h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Watang Sawitto	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai analisis kebutuhan		67.031.000
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah jasa penyediaan perizinan jasa sopir jasa service suku cadang dan BBM kendaraan dinas operasional yang terbayarkan tepat waktu		Rp	86.000.000	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah jasa penyediaan perizinan jasa sopir jasa service suku cadang dan BBM kendaraan dinas operasional yang terbayarkan tepat waktu		67.031.000
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisis kebutuhan		Rp	15.000.000	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisis kebutuhan		10.170.000
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan bangunan kantor		Rp	61.200.000	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan bangunan kantor		67.031.000
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Watang Sawitto	Persentase Aparatur yang disiplin mematuhi aturan Kepegawaian dan Persentase Aparatur Yang Meningkat		Rp	121.580.000	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Watang Sawitto	Persentase Aparatur yang disiplin mematuhi aturan Kepegawaian dan Persentase Kepegawaian dan Persentase		112.475.000
1. Pengadaan Pakisan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakisan Batik pegawai dan pakisan olah raga		Rp	36.000.000	1. Pengadaan Pakisan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakisan Batik pegawai dan pakisan olah raga		10.580.000
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang terselesaikan tepat		Rp	3.500.000	2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang		3.975.000
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara		Rp	92.000.000	3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang		98.000.000

5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang tidak ada usulan dari pelayanan provinsi ,LSM dan asosiasi-asosiasi dan perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah provinsi serta usulan Musrenbang kabupaten/kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN PINRANG

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Renstra BKPM Tahun 2020-2024. sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu: 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal; 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024.

Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan landasan dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah. Pada hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen izin dilaksanakan di satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati kepada kepala PTSP dan penyederhanaan perizinan dengan mempercepat waktu, sistem prosedur, persyaratan dan biaya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Rumusan misi RPJMD Kabupaten Pinrang tahun 2019-2024 yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) adalah Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat) uraiannya sebagai berikut :

1. Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.

Misi ini mencakup upaya pokok *mewujudkan sistem birokrasi yang akuntabel dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Upaya perwujudan sistem birokrasi yang akuntabel serta pelayanan publik yang prima tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau electronic governance (e-governance).*

a) Tujuan

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- 2) Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perizinan sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau electronic governance (e-governance).

b) Sasaran

- 1) Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja
- 2) Meningkatnya aspek legalitas perizinan

2. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, *pengembangan investasi yang atraktif*, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan pertanian, pembangunan peternakan, pembangunan perikanan, dan optimalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat.

- a) Tujuan
1) Meningkatkan Daya saing Investasi Daerah
- b) Sasaran
1) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal
2) Meningkatkan penanaman modal

Adapun Tujuan Dan Sasaran Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Dinas PMPTSP
Kabupaten Pinrang Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kerja 2023
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	Nilai LKjIP	74
			Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	74
2.	Meningkatkan Daya saing Investasi Daerah	Meningkatnya penanaman modal	Jumlah Proyek PMDN dan PMA	Proyek PMDN 2.351 Proyek PMA 6
3.	Memfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perizinan sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau electronic governance (e-governance).	Meningkatnya aspek legalitas perizinan	Jumlah Investasi PMDN dan PMA	Perizinan Usaha 2900 Perizinan Non Usaha 1800
4.	Meningkatkan Daya saing Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Nilai Investasi PMDN dan PMA	PMDN: 2.042.064.013.975 PMA: \$ 151.894.393

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan terhadap program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Kegiatan

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Sub Kegiatan

- a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
- c. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan

1.1.2 Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- d. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
- e. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3. Administrasi Umum

1.1.3 Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - k. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - l. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
 - m. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - n. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - o. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - p. Pengadaan Mebeleur
 - q. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - r. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - s. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - t. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - u. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya
- 1.1.4 Sub Kegiatan
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

2.1 Kegiatan

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Sub Kegiatan

- a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2.1.2 Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

3.1 Kegiatan

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

3.1.1 Sub Kegiatan

- a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

4.1 Kegiatan

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

4.1.1 Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
- c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

5.1 Kegiatan

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Sub Kegiatan

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

6.1 Kegiatan

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6.1.1 Sub Kegiatan

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tabel 3.2
Rencana Program, Kegiatan, perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	RENCANA TAHUN 2022		SUMBER DANA	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah									
MISI 1 : Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi									
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja		Nilai SAKIP	Kec.Wt Sawitb		73,5			74
			Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	Kec.Wt Sawitb		73,5			74
		1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Wt Sawitb	100%	4.725.966.307	DAU	100%	6.143.756.199
		a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Disusun		6 Dokumen	32.715.000	DAU	6 Dokumen	42.529.500
		01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 dan RENJA		3 Dokumen	8.800.000	DAU	3 Dokumen	11.440.000
		02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Kec.Wt Sawitb	1 Dokumen	5.380.000	DAU	1 Dokumen	6.994.000
		03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Kec.Wt Sawitb	1 Dokumen	8.200.000	DAU	1 Dokumen	8.060.000
		04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Kec.Wt Sawitb	1 Dokumen	2.200.000	DAU	1 Dokumen	2.860.000
		05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Kec.Wt Sawitb	1 Dokumen	2.835.000	DAU	1 Dokumen	3.685.500
06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP,LPPD,SPIP dan Perjanjian Kinerja yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kec.Wt Sawitb	4 Dokumen	7.300.000	DAU	4 Dokumen	9.490.000		

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan	Kec.Wt.Sawitto	100%	3.330.851.307	DAU	100%	4.330.106.699
01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jasa Gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	2.855.237.807	DAU	14 Bulan	3.711.809.149
02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK,kegiatan makan minum,enggandaan/fotocopy,cetak yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitto	7 item	337.568.500	DAU	7 item	438.839.050
03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitto	18 jasa	130.000.000	DAU	18 jasa	169.000.000
05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitto	1 laporan	6.545.000	DAU	1 laporan	8.508.500
07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitto	2 laporan	1.500.000	DAU	2 laporan	1.950.000
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan SKPD	Kec.Wt.Sawitto	100 %	11.700.000	DAU	100 %	15.210.000
05. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu dan jumlah laporan pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu		2 orang	11.700.000	DAU	2 orang	15.210.000

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang disiplin mematuhi eturan Kepegawaian dan Persentase Aparatur Yang Meningkatkan Kecakapan dan Ketramplilannya	Kec.Wt.Sawitlo	100 %	139.700.000	DAU	100 %	181.610.000
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Batik pegawai dan pakaian olah raga		136 Pasang	35.700.000	DAU	137 Pasang	46.410.000
03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitlo	7 kegiatan	4.000.000	DAU	8 kegiatan	5.200.000
11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitlo	3 laporan	100.000.000	DAU	4 laporan	130.000.000
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi umum yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitlo	3 paket	136.800.000	DAU	3 paket	176.800.000
01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik (lampu pijar baleray kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		1 Paket	8.000.000	DAU	1 Paket	10.400.000
02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitlo	7 jenis barang	8.000.000	DAU	8 jenis barang	10.400.000
09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitlo	50 Kali	120.000.000	DAU	55 Kali	156.000.000

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitb	9 jenis paket pekrjaan	600.000.000	DAU	12 jenis paket pekrjaan	780.000.000
05 Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeleur sesuai analisa kebutuhan		4 Buah	10.000.000	DAU	5 jenis barang	50.000.000
06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitb	4 jenis barang	90.000.000	DAU	5 jenis barang	117.000.000
09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang dibangun sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitb	1 paket pekerjaan	500.000.000	DAU	2 paket pekerjaan	650.000.000
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pelayanan umum kantor	Kec.Wt.Sawitb	100 %	315.000.000	DAU	100 %	409.500.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon,Internet,SMS dan listrik		4 jenis	35.000.000	DAU	4 jenis	45.500.000
04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanan umum kantor yang terbayarkan lepat waktu	Kec.Wt.Sawitb	5 jenis	280.000.000	DAU	5 jenis	364.000.000
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitb	100 %	160.000.000	DAU	100 %	208.000.000
02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa penyediaan perizinan,jasa sopir,jasa service,suku cadang dan BBM kendaraan dinas operasional yang terbayarkan lepat waktu		3 kendaraan dinas	85.000.000	DAU	4 kendaraan dinas	110.500.000

		06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitto	4 jenis barang	15.000.000	DAU	4 jenis barang	19.500.000
		11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan bangunan kantor	Kec.Wt.Sawitto	3 paket pekerjaan	60.000.000	DAU	3 paket pekerjaan	78.000.000
				Kec.Wt.Sawitto					
M.4 Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan									
Meningkatkan Daya saing Investasi Daerah	Meningkatnya penanaman modal	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek PMDN dan PMA	Kec.Wt.Sawitto	Proyek PMDN 2.239	75.000.000	DAU	Proyek PMDN 2.351	262.500.000
					Proyek PMA 6			Proyek PMA 6	
		a. Penetapan pemberian fasilitas/intensif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian fasilitas/intensif di bidang Penanaman Modal		100%	-	DAU	100%	65.000.000
		01 Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah kebijakan daerah menegani pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan penanaman modal		2 kebijakan	-	DAU	2 kebijakan	30.000.000
		02 Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan penanaman modal	Persentase laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan penanaman modal		Kec.Wt.Sawitto	2 laporan	-	DAU	2 laporan

	b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah potensi Investasi daerah	Kec.Wt.Sawitb	1 Kegiatan	75.000.000	DAU	2 Kegiatan	197.500.000
	01. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPM)	Kec.Wt.Sawitb	-	-	DAU	1 Dokumen	100.000.000
	02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Lokasi Pengembangan Investasi /Penyusunan Prospektus Investasi	Kec.Wt.Sawitb	1 paket pekerjaan	75.000.000	DAU	1 paket pekerjaan	97.500.000
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	Kec.Wt.Sawitb	4,76%	515.000.000	DAU	4,76%	669.500.000
		Jumlah proyek PMDN dan PMA		PMDN : 2.239 PMA : 6	365.000.000	DAU	PMDN : 2.352 PMA : 6	
		Jumlah Tenaga Kerja	Kec.Wt.Sawitb	2.239		DAU	2.352	
	a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kec.Wt.Sawitb	5 Kegiatan	515.000.000	DAU	6 kegiatan	669.500.000
	01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Buku dan Brosur Investasi		2 Kegiatan	15.000.000	DAU	2 Kegiatan	19.500.000
	02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal Daerah (Pameran Invetasi Pekan Raya Sul Sel,Sulsel Expo,Pinrang Expo,FIP)	Kec.Wt.Sawitb	4 Kali	500.000.000	DAU	4 Kali	650.000.000

MISI 1 : Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi									
Memfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perizinan sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau electronic governance (e-governance).	Meningkatnya aspek legalitas perizinan	2.PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Investasi PMDN dan PMA		- Perizinan Usaha 2700	225.000.000	DAU	- Perizinan Usaha 2900	292.500.000
					- Perizinan Non Usaha 1740		DAU	- Perizinan Non Usaha 1800	
		a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan perizinan penanaman modal yang akuntabel		100%	225.000.000	DAU	100%	292.500.000
		01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan dan waktu proses penyelesaian perizinan sesuai standa pelayanan		2 Kegiatan	30.000.000	DAU	3 Kegiatan	39.000.000
		02 Pemantauan Penuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal	Kec.Wt.Sawitb	4 kegiatan	30.000.000	DAU	5 kegiatan	39.000.000
		03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Permasalahan Perusahaan PMA dan PMDN yang di tindak lanjut serta Aplikasi pengaduan permasalahan pelaksanaan PM	Kec.Wt.Sawitb	4 laporan	15.000.000	DAU	5 laporan	19.500.000
04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan one day service, Film Pendek dan Jemput Bola serta cetak brosur layanan	Kec.Wt.Sawitb	5 kegiatan	150.000.000	DAU	5 kegiatan	195.000.000		

M.4 Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan									
Meningkatkan Daya saing Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	3. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi PMDN dan PMA		- PMDN: 1.944.822.870.4 53' - PMA: \$ 144.661.327	80.000.000	DAU	PMDN: 2.042.064.013.975 PMA: \$ 151.894.393	208.000.000
		a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kec.Wt.Sawitb	10 kegiatan	80.000.000	DAU	10 kegiatan	104.000.000
		01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian,pemantauan dan pengawasan investasi penanaman modal	Kec.Wt.Sawitb	100%	30.000.000	DAU/DAK	100%	39.000.000
		02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan LKPM,SKM dan Kebijakan PM serta Pelayanan Perizinan dan Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah	Kec.Wt.Sawitb	3 kegiatan	30.000.000	DAU/DAK	4 kegiatan	273.233.000
		03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan sosialisasi UMKM,LKPM Online,perizinan bangunan gedung dan FIP,perizinan usaha secara OSS,Bimtek RAJIN dan Salgas Percepatan Investasi	Kec.Wt.Sawitb	7 kegiatan	20.000.000	DAU/DAK	8 kegiatan	61.540.000

Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perizinan sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau electronic governance (e-governance).	Meningkatnya aspek legalitas perizinan	4.PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Kepuasan masyarakat (SKM)	Kec.Wt.Sawitb	Indeks SKM (85)	100.000.000	DAU	Indeks SKM (86)	130.000.000
		a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec.Wt.Sawitb	100%	100.000.000	DAU	100%	130.000.000
		01. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi berbasis IT dan pengelolaan data informasi	Kec.Wt.Sawitb	3 kegiatan	100.000.000	DAU	4 kegiatan	130.000.000
TOTAL RENCANA ANGGARAN						5.720.966.307			7.602.256.199

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan DPMPTSP
Kabupaten Pinrang Tahun 2023

Tabel 3.2
Rencana Program, Kegiatan, perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	RENCANA TAHUN 2023		SUMBER DANA
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatf 2023	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja		Nilai SAKIP	Kec.Wt.Sawitb			
			Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	Kec.Wt.Sawitb			
		1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Wt.Sawitb	100%	#VALUE!	DAU
		a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Disusun		6 Dokumen	33.835.000	DAU
		01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 dan RENJA		3 Dokumen	Rp 8.800.000	DAU
		02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Kec.Wt.Sawitb	1 Dokumen	Rp 6.500.000	DAU
		03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Kec.Wt.Sawitb	1 Dokumen	Rp 6.200.000	DAU
		04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Kec.Wt.Sawitb	1 Dokumen	Rp 2.200.000	DAU
		05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Kec.Wt.Sawitb	1 Dokumen	Rp 2.835.000	DAU
		06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtsar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJP,LPPD,SPIP dan Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitb	4 Dokumen	Rp 7.300.000	DAU
		b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Keuangan	Kec.Wt.Sawitb	100%	3.694.905.469	DAU
		01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jasa Gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	Rp 3.214.365.977	DAU
		02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK,kegiatan makan minum,pengandaan/fotocopy,cetak yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitb	7 item	Rp 338.343.492	DAU
		03 Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitb	18 jasa	Rp 134.000.000	DAU
05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang akuntabel dan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitb	1 laporan	Rp 6.696.000	DAU		
07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitb	2 laporan	Rp 1.500.000	DAU		

c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan SKPD	Kec.Wt.Sawitb	100 %	Rp 11.700.000	DAU
	05. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa pengelolaan barang dan aset yang terbayarkan tepat waktu dan jumlah laporan pengelolaan barang dan aset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu		2 orang	Rp 11.700.000	DAU
d.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang disiplin mematuhi aturan Kepegawaian dan Persentase Aparatur Yang Meningkatkan Kecakapan dan Ketrampilannya	Kec.Wt.Sawitb	100 %	131.500.000	DAU
	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Batik pegawai dan pakaian olah raga		137 Pasang	Rp 36.000.000	DAU
	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitb	8 kegiatan	Rp 3.500.000	DAU
	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitb	4 laporan	Rp 92.000.000	DAU
e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi umum yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitb	3 paket	135.000.000	DAU
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik (lampu pijar baterai kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan		1 Paket	Rp 7.000.000	DAU
	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitb	8 jenis barang	Rp 8.000.000	DAU
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	Kec.Wt.Sawitb	55 Kali	Rp 120.000.000	DAU
f.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitb	12 jenis paket pekerjaan	#VALUE!	DAU
	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeleur sesuai analisa kebutuhan		5 jenis barang	50.000.000	DAU
	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitb	5 jenis barang	#VALUE!	DAU
	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang dibangun sesuai analisa kebutuhan	Kec.Wt.Sawitb	2 paket pekerjaan	#VALUE!	DAU

		g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase jasa pelayanan umum kantor	Kec.WL.Sawitb	100 %	#VALUE!	DAU
		02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet, SMS dan listrik		4 jenis	#VALUE!	DAU
		04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanan umum kantor yang terbayarkan tepat waktu	Kec.WL.Sawitb	5 jenis	#VALUE!	DAU
		h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai analisa kebutuhan	Kec.WL.Sawitb	100 %	#VALUE!	DAU
		02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa penyediaan perizinan, jasa sopir, jasa service, suku cadang dan BBM kendaraan dinas operasional yang terbayarkan tepat waktu		4 kendaraan dinas	#VALUE!	DAU
		06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	Kec.WL.Sawitb	4 jenis barang	#VALUE!	DAU
		11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan bangunan kantor	Kec.WL.Sawitb	3 paket pekerjaan	#VALUE!	DAU
M.4 Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan							
Meningkatkan Daya Saing Investasi Daerah	Meningkatnya penanaman modal	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek PMDN dan PMA	Kec.WL.Sawitb	Proyek PMDN 2.351 Proyek PMA 6	130.000.000	DAU
		a. Penetapan pemberian fasilitas/intensif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian fasilitas/intensif di bidang Penanaman Modal		100%	65.000.000	DAU
		01 Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah kebijakan daerah menegani pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan penanaman modal		2 kebijakan	30.000.000	DAU
		02 Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan penanaman modal	Persentase laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan penanaman modal	Kec.WL.Sawitb	2 laporan	35.000.000	DAU

	b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah potensi investasi daerah	Kec.Wt.Sawitto	2 Kegiatan	100.000.000	DAU
	01. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPM)	Kec.Wt.Sawitto	1 Dokumen	100.000.000	DAU
	02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Lokasi Pengembangan Investasi /Penyusunan Prospektus Investasi	Kec.Wt.Sawitto	1 paket pekerjaan	76.500.000	DAU
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	Kec.Wt.Sawitto	4,76%	#VALUE!	DAU
		Jumlah proyek PMDN dan PMA		PMDN : 2.352 PMA : 6		DAU
		Jumlah Tenaga Kerja	Kec.Wt.Sawitto	2.352		DAU
	a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kec.Wt.Sawitto	6 kegiatan	669.500.000	DAU
	01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Buku dan Brosur Investasi		2 Kegiatan	19.500.000	DAU
	02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal Daerah (Pameran Invetasi Pekan Raya Sul Sel,Susel Expo,Pinrang Expo,FIP)	Kec.Wt.Sawitto	4 Kali	650.000.000	DAU

MISI 1 : Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi							
Memfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perizinan sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau electronic governance (e-governance).	Meningkatnya aspek legalitas perizinan	2.PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Investasi PMDN dan PMA		- Perizinan Usaha 2900	292.500.000	DAU
					- Perizinan Non Usaha 1800		DAU
		a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan perizinan penanaman modal yang akuntabel		100%	292.500.000	DAU
		01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan dan waktu proses penyelesaian perizinan sesuai standa pelayanan		3 Kegiatan	39.000.000	DAU
		02 Pemantauan Penuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal	Kec.Wt.Sawitb	5 kegiatan	39.000.000	DAU
		03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Permasalahan Perusahaan PMA dan PMDN yang ditindak lanjuti serta Aplikasi pengaduan permasalahan pelaksanaan PM	Kec.Wt.Sawitb	5 laporan	19.500.000	DAU
04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan one day service,Film Pendek dan Jemput Bola serta cetak brosur layanan	Kec.Wt.Sawitb	5 kegiatan	195.000.000	DAU		

Meningkatkan Daya saing Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	3. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi PMDN dan PMA		PM DN: 2.042.064.013.975 PMA: \$ 151.894.393	572.000.000	DAU
		a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kec.Wt.Sawitb	10 kegiatan	104.000.000	DAU
		01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian,pemantuan dan pengawasan investasi penanaman modal	Kec.Wt.Sawitb	100%	39.000.000	DAU/DAK
		02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan LKPM,SKM dan Kebijakan PM serta Pelayanan Perizinan dan Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah	Kec.Wt.Sawitb	4 kegiatan	390.000.000	DAU/DAK
		03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan sosialisasi UMKM,LKPM Online,perizinan bangunan gedung dan FP,perizinan usaha secara OSS,Bimtek RAJIN dan Salgas Percepatan Investasi	Kec.Wt.Sawitb	8 kegiatan	39.000.000	DAU/DAK
Memfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perizinan sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau electronic governance (e-governance).	Meningkatnya aspek legalitas perizinan	4.PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Kepuasan masyarakat (SKM)	Kec.Wt.Sawitb	Indeks SKM (86)	130.000.000	DAU
		a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec.Wt.Sawitb	100%	130.000.000	DAU
		01. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi berbasis IT dan pengelolaan data informasi	Kec.Wt.Sawitb	4 kegiatan	130.000.000	DAU
TOTAL RENCANA ANGGARAN						7.602.256.199	

Dari uraian tabel rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan rencana anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) program ,14 (Empat Belas) Kegiatan, 43 (Empat Puluh Tiga) Sub Kegiatan dengan uraian sebagai program sebagai berikut yaitu **Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota** adalah **Rp. 5.233.440.469** dan **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** Rp. **130.000.000**, **Program Promosi Penanaman Modal** adalah **Rp. 669.500.000**, **Program Pelayanan Penanaman Modal** adalah **Rp. 292.500.000**, **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** adalah **Rp. 572.000.000**, **Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal** adalah **Rp130.000.000** sehingga **total anggaran** sebesar **Rp. 7.602.256.199 (Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)**. dan sumber pendanaannya terdiri dari Dana DAU dan DAK

Dari uraian tabel rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan rencana anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) program ,14 (Empat Belas) Kegiatan, 43 (Empat Puluh Tiga) Sub Kegiatan dengan uraian sebagai program sebagai berikut yaitu **Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota** adalah **Rp. 5.233.440.469** dan **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** Rp. 130.000.000, **Program Promosi Penanaman Modal** adalah **Rp. 669.500.000**, **Program Pelayanan Penanaman Modal** adalah **Rp. 292.500.000**, **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** adalah **Rp. 572.000.000**, **Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal** adalah **Rp130.000.000** sehingga **total anggaran** sebesar **Rp. 7.602.256.199 (Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)**. dan sumber pendanaannya terdiri dari Dana DAU dan DAK

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Pinrang serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2023.

RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 ini merupakan arahan dan acuan pelaksanaan tugas bagi unit kerja di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang. Dengan demikian Setiap bagian dan bidang akan menyusun rencana dan langkah-langkah persiapan pelaksanaannya sehingga RENJA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023 ini dapat diwujudkan secara optimal.

5.2 Kaidah –Kaidah Pelaksanaan

- a. Renja Dinas PMPTSP merupakan rencana tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMPTSP Tahun 2019-2024.
- b. Kepala Dinas PMPTSP berkewajiban melakukan evaluasi dan memonitoring setiap bagian dan bidang dalam menyusun Renja SKPD Dinas PMPTSP sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas PMPTSP.
- c. Dinas PMPTSP berkewajiban mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih sesuai tugas dan fungsinya yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024.
- d. Merupakan arahan dan acuan pelaksanaan tugas bagi unit kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.
- e. Setiap bagian dan bidang dalam menyusun program, kegiatan dan Sub Keegiatannya harus mampu melaksanakan peningkatan kinerja pelayanan sehingga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga hasil pelaksanaan kegiatannya mampu memberikan hasil (outcome) yang optimal yang dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna layanan dan para investor.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Dinas PMPTSP dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati Pinrang dalam mencapai tujuan sasaran program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 maka Dinas PMPTSP telah dan akan melanjutkan beberapa program unggulan yang inovatif dalam peningkatan pelayanan perizinan dan peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Pinrang yaitu :

- **SIAP BOSS** (Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan Berbasis OSS) yang merupakan system pelayanan dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan perizinan usaha dan non usaha dan telah dilengkapi dengan penandatanganan elektronik (TTE)
- **RAJIN** (Gerai Perizinan) yang merupakan aplikasi perizinan di Tingkat Desa dan Kelurahan terintegrasi dengan System Informasi Perizinan (SIP) DPMPTSP Kabupaten Pinrang.
- **KONGSI** (Kolaborasi Pembangunan Berbasis Investasi) Kolaborasi Pembangunan Berbasis Investasi yang merupakan suatu instrumen yang memudahkan praktik kerjasama antar masyarakat dengan pelaku usaha (investor) dalam melaksanakan dan mengembangkan investasi serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- **PIF** (Pinrang Investment Forum) merupakan Forum Investasi yang diadakan dalam rangka menarik minat investor PMDN dan PMA.
- **PIA (Pinrang Investment Award)**
- **Prospektus Investasi**
- **Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pinrang**
- **Drive THRU Pengambilan Izin**
- Melakukan evaluasi dan memonitoring pelaksanaan program dan kegiatan disetiap bidang dan bagian, serta peningkatan sarana dan prasarana.

Pinrang, Januari 2022

Kepala DPMPTSP Kab.Pinrang

ANDI MIRANI, AP., M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip: 19740603 199311 2 001